



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANANTO TRIYOGO
2. Jabatan : KETUA DEPARTEMEN SILVIKULTUR
3. NHK : 813080

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.210.000.000

1. Bangunan Seluas 180 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah Seluas 220 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
3. Tanah Seluas 180 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 182 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 207.500.000

1. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOBIL, NISSAN LIVINA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOTOR, HONDA KARISMA Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 72.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 173.450.000

**F. HARTA LAINNYA****Sub Total**

Rp. ----

Rp. 2.663.450.000

III. HUTANG

Rp. 300.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.363.450.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpн.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpн.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.